

INTISARI

Perdagangan manusia tetap menjadi kejahatan transnasional yang mendesak di Asia Tenggara. Penelitian ini menyelidiki asosiasi antara kedatangan wisatawan internasional (*international tourist arrivals*), efektivitas pemerintah (*government effectiveness*), dan korban perdagangan manusia yang terdeteksi (*detected trafficking victims*) di lima negara ASEAN (2007–2020), termasuk efek moderasi dan *spatial spillover*. Dengan menggunakan estimator PPMLHDFE dengan model *Spatial Lag of X* (SLX) dan matriks bobot KNN=1, analisis ini memperhitungkan *overdispersion*, efek tetap (*fixed effects*), dan ketergantungan spasial (*spatial interdependence*). Tiga temuan utama muncul. Pertama, *international tourist arrival* berasosiasi positif dengan *detected trafficking victims*, sementara *government effectiveness* menunjukkan asosiasi negatif. Kedua, interaksi antara *international tourist arrival* dan *government effectiveness* bernilai negatif, mengindikasikan bahwa institusi yang lebih kuat melemahkan asosiasi antara pariwisata dan perdagangan manusia. Ketiga, *spatial spillover* dari negara tetangga terbukti ada: *spillover government effectiveness* berasosiasi negatif dengan *detected trafficking victims*, sementara *spillover international tourist arrival* berasosiasi positif. Pola *distance decay* yang jelas memvalidasi bahwa *spillover* paling kuat terjadi di antara negara tetangga terdekat. Uji ketahanan (*robustness checks*) menggunakan *spatial lags* dan spesiasi parsimoni yang mengeluarkan dua variabel kontrol (*net migration* dan *population*) mengonfirmasi stabilitas temuan ini. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama regional dan penguatan kelembagaan untuk mengurangi risiko perdagangan manusia yang terkait dengan mobilitas internasional.

Kata kunci: *human trafficking; international tourist arrivals; government effectiveness; spatial spillovers; PPMLHDFE; ASEAN*

ABSTRACT

Human trafficking remains a pressing transnational crime in Southeast Asia. This study investigates the associations between international tourist arrivals, government effectiveness, and detected trafficking victims in five ASEAN countries (2007–2020), including moderating and spatial spillover effects. Using PPMLHDFE with a Spatial Lag of X (SLX) model and KNN=1 weight matrix, the analysis accounts for overdispersion, fixed effects, and spatial interdependence. Three findings emerge. First, international tourist arrivals are positively associated with detected trafficking victims, while government effectiveness shows a negative association. Second, the interaction between international tourist arrivals and government effectiveness is negative, indicating that stronger institutions weaken the international tourist arrival-detected trafficking victims association. Third, spatial spillovers are evident: government effectiveness spillovers are negatively associated with detected trafficking victims, while international tourist arrival spillovers are positively associated. A clear distance decay pattern validates that spillovers are strongest among nearest neighbors. Robustness checks using spatial lags and a parsimonious specification excluding two control variables (net migration and population) confirm the stability of these findings. The results underscore the need for regional cooperation and institutional strengthening to mitigate trafficking risks associated with international mobility.

Keywords: *human trafficking; tourism; governance; spatial spillovers; PPMLHDFE; ASEAN*

tingginya jumlah *detected trafficking victims*, yang menunjukkan bahwa mobilitas manusia melalui sektor pariwisata berpotensi meningkatkan peluang terjadinya eksploitasi. Temuan deskriptif ini sejalan dengan *Routine Activity Theory*, yang menyatakan bahwa meningkatnya mobilitas memperbesar peluang bertemunya pelaku, korban, dan berkurangnya efektivitas pengawasan.

Di sisi lain, Malaysia menunjukkan pola yang berbeda. Meskipun menjadi negara dengan jumlah wisatawan internasional tertinggi, jumlah *detected trafficking victims* relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya mobilitas wisatawan tidak secara otomatis meningkatkan perdagangan orang apabila diimbangi oleh kapasitas kelembagaan yang baik.

Sebaliknya, Philippines mencatat jumlah *detected trafficking victims* tertinggi meskipun tidak termasuk negara dengan arus wisatawan terbesar. Pola ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pariwisata, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural lain yang tidak secara eksplisit dimodelkan dalam penelitian ini, seperti kondisi sosial-ekonomi, konflik domestik, maupun karakteristik jaringan perdagangan orang. Oleh karena itu, hasil ini menguatkan pentingnya memasukkan variabel kontrol dan kualitas institusi dalam analisis empiris.

Indonesia menunjukkan posisi yang relatif moderat baik dari sisi pariwisata maupun jumlah korban perdagangan orang. Sementara itu, Myanmar memiliki tingkat pariwisata dan jumlah *detected trafficking victims* yang sama-sama rendah. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan terbatasnya mobilitas internasional akibat

instabilitas politik dan keamanan selama sebagian periode pengamatan, sehingga peluang terjadinya aktivitas perdagangan orang lintas negara melalui jalur pariwisata juga relatif lebih kecil. Secara keseluruhan, Grafik 4.1 tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal antara pariwisata dan perdagangan orang, melainkan memberikan ilustrasi deskriptif mengenai variasi karakteristik antarnegara.

Tabel 4.2 Peringkat Rata-rata *Detected Trafficking Victims*, *International Tourist Arrivals*, dan *Government Effectiveness* di Negara ASEAN-5, Tahun 2007–2020

Peringkat	Negara	Detected Trafficking Victims	Peringkat <i>International Tourist Arrivals</i>	Peringkat <i>Government Effectiveness</i>
1	Filipina	12.073	4	3
2	Thailand	7.179	2	2
3	Indonesia	6.374	3	4
4	Malaysia	5.289	1	1
5	Myanmar	4.517	5	5

Sumber: UNODC dan *World Bank* (2007-2020); diolah.

Tabel 4.2 bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai posisi relatif masing-masing negara sebelum dilakukan analisis ekonometrika. Secara umum, terlihat bahwa tidak terdapat hubungan yang sepenuhnya linier antara tingginya arus wisatawan internasional dan jumlah *detected trafficking victims*. Thailand menunjukkan pola yang relatif konsisten dengan hipotesis penelitian, yaitu berada pada peringkat kedua baik dalam jumlah *international tourist arrivals* maupun *detected trafficking victims*. Kondisi ini memberikan indikasi awal bahwa negara dengan mobilitas internasional yang tinggi memiliki potensi risiko perdagangan orang yang lebih besar.